

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*
DI KULON PROGO**

Dini Utami*¹ dan Andri Waskita Aji²

*Dini_cilik@yahoo.com

ABSTRACT

This research aimed to determine the individual tax payer perceptions about the implementation of self assessment system to measure tax evasion in Kulon Progo. Variables that are used to represent the taxpayer's perception is tax regulations, the service tax authorities, the effectiveness of the tax system.

Sampling using purposive sampling and data collection using the questionnaire. The questionnaire distributed to the individual tax payer who is in Kulon Progo. Technical analysis of the data in this research is multiple linear regression analysis using SPSS 20 for windows

The results showed that the tax regulations negatively affect tax evasion acts are of significant, negative effect on the service tax authorities of tax evasion significant action, the effectiveness of the tax system significantly influence the actions of tax evasion significantly. The ability of the regression equation to explain the effect of tax laws, the service tax authorities and the effectiveness of the tax system amounted to 77.55%, while 22.5% is explained by other variables outside the research.

Keywords: tax regulations, tax authorities and the effectiveness of the service system of taxation.

¹ Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
²

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

Menurut Adriani (Fidel 2010:4) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem perpajakan mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang dalam bidang sosial dan ekonomi. Sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak, terutangpun berubah meliputi (1) *self assessment system* (wajib pajak menghitung sendiri pajaknya), (2) *official assessmentsystem* (wajib pajak menyampaikan informasi objek pajaknya, kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak), (3) *with holding system* (campuran antara *self assessment system* dan *official assessment system* dengan berbagai kombinasinya) (Suandy, 2008:8). Di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Fidel, 2010:11).

Self assesment system bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan menimbulkan adanya *tax evasion*. *Tax evasion* adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data (suandy, 2008 : 22).

Hal-hal yang melatar belakangi adanya tindakan penyelundupan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140-142).

KAJIAN TEORI

Peraturan Perpajakan

Dalam pelaksanaan *self assessment system* wajib pajak harus memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fikriningrum, 2012). Wajib pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu.

Secara psikologis dan sadar hukum, wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan kepada negara. Sosialisasi akan undang-undang perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan menjadi solusi atas kasus kasus penggelapan pajak. Ditambah dengan sistem perpajakan yang menggunakan sistem *self assessment system* yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus dibayar. Sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sehingga tidak terjadi penggelapan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :

H₁ : peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion

2. Pelayanan Fiskus

Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan terhadap pelanggan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus (Nugroho, 2012)

Fiskus adalah petugas pajak, dan juga dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan

wajib pajak dengan ramah, adil, tegas, dan bertanggung jawab serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui satuan kerja yang ada dibawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara. Salah satu aspek yang menjadi peranan penting bagi fiskus yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak adalah aspek pelayanan terhadap wajib pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan memegang kunci utama dalam menanamkan citra Direktorat Jendral Pajak.

Pelayanan fiskus mempengaruhi pelaksanaan *self assessment system* agar berjalan dengan baik. Karena pelayanan yang memuaskan akan membuat wajib pajak semakin termotifasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya sendiri. Oleh karena itu fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :

H₂ : pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion

Efektifitas Sistem Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia sekarang sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Terlihat dari pelaksanaan laporan bulanan dan laporan tahunan serta pengurusan administrasi perpajakan yang sekarang ini telah direformasi perpajakannya. Konsep modernisasi perpajakan di Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan konsep pelayanan yang prima, adanya pengawasan yang intensif dan dikaitkan dengan pelaksanaan *self assessment system*. Konsep modernisasi

perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarannya hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri (Fidel, 2010).

Hal ini sangat terasa ketika wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak dan melakukan pelaporan perpajakan, dimana telah terdapat modernisasi. Saat ini untuk pelaporan dan pendaftaran perpajakan dengan cara *e-regISTRATION* (sistem pendaftaran dan perubahan data wajib pajak melalui sistem online dan terhubung langsung dengan Dirjen Pajak), *e-filing* (suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time), *e-SPT* (data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Dirjen Pajak) dan sebagainya, yang diciptakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya kepada negara. Dan dapat juga memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain : pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-filing*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan diberbagai tempat. Keempat, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan. Kelima, pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui *e-regISTRATION* dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar

membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan *self assessment system*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :

H₃ : efektifitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion

4. Tax Evasion

Tindak pidana fiskal atau yang lebih sering disebut *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan hukum yang menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), berikut definisi-definisi mengenai *tax evasion* berdasarkan pendapat para pakar, antara lain:

- 1) Ernest R. Mortenson mengemukakan bahwa penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
- 2) Robert H. Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu :

H₄ : peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, efektifitas sistem perpajakan berpengaruh simultan terhadap tindakan tax evasion.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kulon Progo pada tanggal 16 Februari 2015. Tidak semua wajib pajak di Kulon Progo dijadikan obyek penelitian karena jumlahnya yang terlalu banyak. Guna efisiensi waktu dan biaya maka dilakukan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Alasan pengambilan sampel

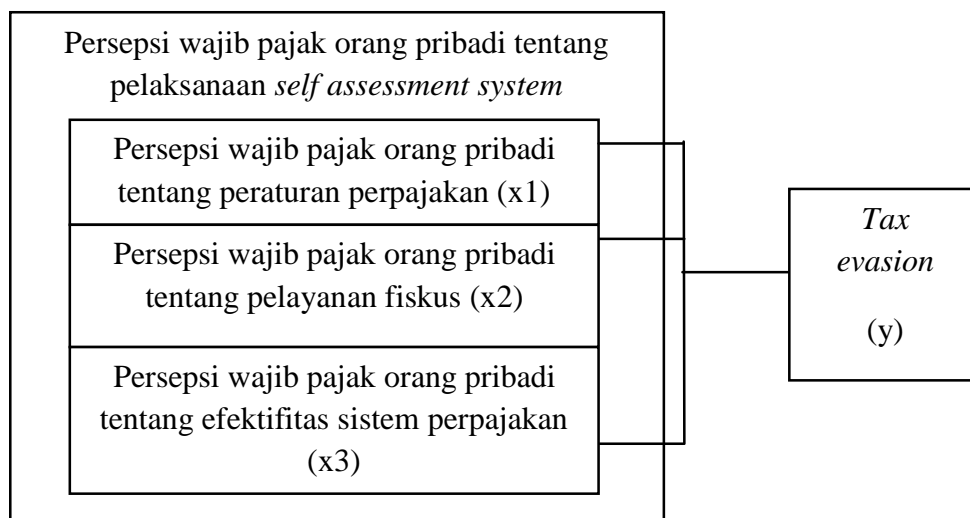
dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* karena hanya akan memilih sampel dengan kriteria tertentu agar jawaban dari para responden sesuai dengan jalannya penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu: wajib pajak yang ada di Kulon Progo dan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Efferin *et al* (2008) pendekatan kuantitatif berangkat dari penggunaan data-data yang terukur secara tepat yang diperoleh melalui survei atau kuesioner dan dikombinasikan dengan statistik dan pengujian hipotesis yang bebas nilai atau objektif. Dengan cara itu maka dapat dianalisis untuk kemudian dijelaskan hubungan diantara variabel-variabel yang terlibat di dalamnya. Karakteristik dari temuan hasil penelitian dengan pendekatan ini lebih bersifat perumusan suatu bentuk

hubungan yang umum, ringkas untuk dijelaskan, dan dapat digeneralisasikan.

Dalam penelitian ini membahas variabel dependen dan independen. Variabel dalam penelitian ini adalah *tax evasion* yang dapat diartikan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat penerimaan negara. Variabel independen yang digunakan adalah peraturan perpajakan yaitu penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Efektifitas sistem perpajakan adalah pengukuran keberhasilan atau kegagalan sistem dalam memodernisasi cara-cara penyampaian, pelaporan, pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam kerangka pikir.

Kerangka Pikir



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara simultan bahwa variabel-variabel yaitu peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan efektifitas sistem

perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini di buktikan dengan hasil uji regresi linier berganda.

Hasil uji Regresi linier berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51,947	3,118		16,658	,000
	Peraturan Perpajakan	-,713	,121	-,536	-5,886	,000

Pelayanan Fiskus	-,413	,096	-,335	-4,297	,000
efektifitas sistem	-,274	,095	-,249	-2,887	,006

Berdasarkan tabel persamaan regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 51,947 - 0.713 X1 - 0.413 X2 - 0.274 X3 + e$$

Dimana:

Y = tax evasion

X1 = peraturan perpajakan

X2 = pelayanan fiskus

X3 = efektifitas sistem.

Konstanta (alpha) sebesar 51,947 menunjukkan jika peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan efektifitas sistem di Kulon Progo tidak ada atau sama dengan 0 (nol), maka besarnya tingkat tindakan *tax evasion* di kulon progo sebesar 51,947.

Nilai koefisien regresi dari variabel peraturan perpajakan (X1) adalah sebesar -0,713 menunjukkan penurunan *tax evasion* di Kulon Progo. Artinya semakin baik peraturan perpajakan maka akan menurunkan terjadinya tindakan *tax evasion*.

Nilai dari koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X2) sebesar -0,413 menunjukkan penurunan *tax evasion* di Kulon Progo. Artinya semakin tinggi pelayanan fiskus yang diberikan akan menurunkan terjadinya tindakan *tax evasion* di Kulon Progo.

Nilai dari koefisien regresi variabel efektifitas sistem (X3) sebesar -0,274 menunjukkan penurunan *tax evasion* di Kulon Progo. Artinya semakin tinggi efektifitas sistem yang diberikan akan menurunkan terjadinya tindakan *tax evasion* di Kulon Progo.

Hasil dari pengujian hipotesis juga digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel. Dari pengolahan data dilihat bahwa variabel peraturan perpajakan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar -5,886. Dengan demikian diartikan nilai t hitung (5,886) > t tabel (2,021), maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Hasil pengujian untuk variabel pelayanan fiskus (X2) terhadap *tax evasion* adalah sebesar -4,297. Dengan demikian diartikan nilai t hitung (4,2897) > dari t tabel (2,021), maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Hasil perhitungan nilai t hitung untuk variabel efektifitas sistem perpajakan (X3) adalah sebesar -2,887. Dengan demikian p diartikan nilai t hitung (2,887) > dari t tabel (2,021), maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Persepsi masyarakat yang negatif tentang tindakan *tax evasion* akan mempengaruhi perilaku tersebut. Wajib pajak yang berpendidikan akan mempunyai pemahaman peraturan perpajakan akan memanfaatkan pengetahuannya untuk melapor, membayar pajak sesuai dengan tarif pajak dan akan menggunakan sistem-sistem yang telah dimodernisasi oleh Dirjen pajak. Apalagi wajib pajak tidak akan melakukan tindakan *tax evasion* karena mereka sudah mengetahui tentang bahaya dan resiko jika melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut tidak hanya akan merugikan wajib pajak pribadi namun juga merugikan negara.

SIMPULAN

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sistem *self assessment system* termasuk dalam kategori bagus. Artinya pelaksanaan *self assessment system* yang dimulai dari pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan SPT sudah dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Tindakan *tax evasion* di Kulon Progo termasuk dalam kategori rendah. Artinya ditinjau dari kuesioner peneliti dan pertanyaan pertanyaan peneliti sudah mewakili tentang penelitian yang berhubungan dengan tindakan *tax evasion* di Kulon Progo.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Efferin *et al.* 2008. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Erly Suandy, (2008), *Hukum Pajak*, Edisi Keempat, Salemba Empat
- Fidel (2010), *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Murai Kencana
- Fikriningrum, Winda Kurnia. Muchamad Syafruddin. 2012. *Jurnal. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. Diponegoro *Jurnal Of Accounting*.
- Jatmiko, Agus nugroho. (2006). Skripsi. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Diponegoro
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. Skripsi. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Diponegoro
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Skripsi. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perspsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari)* Universitas Diponegoro
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep & Aspek Formal*. Edisi pertama; graha ilmu
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 6
- Widayati dan Nurlis, 2010. Skripsi. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Universitas Indonesia